

DARI KEKACAUAN MENUJU TATA EKONOMI DUNIA BARU

H. CAROKO

Selama dua dasawarsa Dunia Ketiga menempuh jalan dialog dan perundingan untuk membentuk suatu Tata Ekonomi Dunia Baru (TEDB) atas dasar keadilan khususnya keadilan sosial. Biarpun telah diadakan beberapa sidang khusus Majelis Umum PBB, enam sidang UNCTAD, putaran-putaran perundingan GATT dan berbagai konperensi Utara-Selatan, tidak banyak dicapai kemajuan. Tiada soal pokok satu pun yang diselesaikan sejak gagasan TEDB itu dilontarkan pada pertengahan 1960-an. Harapan untuk mewujudkannya mendapat pukulan berat di Cancun, Meksiko, ketika Pertemuan Puncak 22 kepala negara atau pemerintah gagal untuk mendukung diadakannya Perundingan Global di bawah naungan PBB seperti diusulkan oleh Kelompok 77 pada Majelis Umum PBB ke-34 (1979). Hasil itu sebenarnya tidak di luar dugaan. Kalau yang diinginkan oleh Selatan adalah persamaan kesempatan, usaha untuk mendapatkan konsesi-konsesi marginal dari Utara lewat dialog tidak akan mendatangkan hasil itu. Yang memisahkan Utara dan Selatan adalah suatu masalah yang terlalu mendasar untuk dipecahkan lewat perundingan-perundingan di antara para pejabat atau lewat pertemuan okasional (kadang-kadang) pemimpin-pemimpin mereka. Selatan yakin bahwa sistem ekonomi yang berlaku sejauh ini adalah tidak adil dan harus disusun kembali. Akan tetapi Utara menandakan bahwa sistem itu adalah sehat dan tidak boleh dirombak. Kalau ia merugikan Selatan, hal itu ialah karena rakyat di negar-negara berkembang tidak efisien, letargis dan terikat tradisi. Merekalah yang harus mengubah mentalitas dan adat-istiadat mereka, dan bukan sistem yang beroperasi dengan asas usaha bebas (free enterprise). Terhadap pernyataan Presiden Lopez Portillo dari Meksiko dalam pidato pembukaannya bahwa para peserta mempunyai "kewajiban untuk mengubah hubungan-hubungan ekonomi yang telah menciptakan jurang pendapatan yang lebar: pendapatan na-

menandakan sebagai tanggapan bahwa dunia harus belajar hidup sesuai dengan pasaran yang menguntungkan orang yang efisien tetapi menolak yang kurang efisien. Kalau negara-negara berkembang ingin memperbaiki pertanian mereka, dengan senang hati pemerintahnya akan mengirimkan kelompok-kelompok ahli Amerika Serikat untuk mengajar mereka. Amerika Serikat juga bersedia ikut dalam Perundingan Global asal perundingan ini tidak diadakan di bawah naungan PBB. Khususnya wewenang dan fungsi badan-badan khusus PBB seperti IMF, Bank Dunia dan GATT harus dihormati dan keputusan-keputusannya diterima sebagai final. Dengan perkataan lain, Amerika Serikat tidak bersedia menerima kekuasaan Majelis Umum PBB untuk mengawasi perundingan-perundingan global itu dan untuk memutuskan lewat konsensus soal-soal yang tidak mendapat sepakat kata di badan-badan khusus tersebut. Secara demikian Pertemuan Puncak Cancun itu gagal. Demikian pun perjuangan Tata Ekonomi Dunia Baru gagal mencapai kemajuan.¹ Negara-negara Dunia Ketiga menyimpulkan dari kegagalan itu bahwa dalam keadaan sekarang ini negara-negara industri yang menguasai perekonomian dunia tidak akan melepaskan atau membagi kekuasaan mereka itu lewat perundingan-perundingan, dan harus ditempuh jalan lain untuk menyukseskan perjuangan mereka.

Tata Ekonomi Dunia Baru yang diperjuangkan oleh Dunia Ketiga untuk menggantikan sistem yang berlaku sejauh ini itulah tema tulisan ini. Secara berturut-turut akan dibahas sistem ekonomi dunia yang lama dan tata ekonomi dunia baru, masing-masing dengan pokok-pokoknya, hasil perjuangan Dunia Ketiga selama ini, hambatan-hambatannya dan prospeknya.

SISTEM EKONOMI DUNIA LAMA

Perjuangan tata ekonomi dunia baru yang melibatkan tiga perempat penduduk dunia itu berakar pada kesadaran yang semakin kuat di antara negara-negara berkembang bahwa sistem ekonomi internasional yang berlaku selama ini sangat tidak adil dan oleh sebab itu perlu dirombak. Sistem ini adalah warisan jaman kolonial dan disusun oleh negara-negara imperialis Barat ketika mereka menjajah negeri-negeri Asia dan Afrika. Salah satu unsur pokoknya ialah *sistem pembagian kerja internasional* yang menempatkan negeri-negeri jajahan sebagai penghasil dan pengekspor bahan mentah dan komoditi primer lain, dan negara-negara penjajah yang maju sebagai penghasil dan pengekspor barang jadi. Di bawah sistem itu negeri-negeri jajahan menanam komoditi yang laku di pasaran dunia seperti kopi, gula, teh, karet, kapas, goni dan lain sebagainya, lagi pula menggali sumber-sumber daya mineral yang diperlukan

industri negara-negara maju. Sebaliknya mereka menjadi pasaran barang-barang jadi dari negara-negara penjajah mereka dan negara-negara industri lain. Dalam proses itu industri mereka sejauh ada gulung tikar, tidak hanya karena kalah bersaing dengan barang-barang jadi luar negeri, tetapi juga karena pemerintah kolonial tidak menginginkan industri lokal itu berkembang dan menjadi saingan bagi industri negara penjajah.¹

Dari kedudukan yang dominan itu negara-negara penjajah secara leluasa menentukan "terms of trade" yang menguntungkan mereka dengan menekan harga bahan mentah dan komoditi primer lain dan minta harga yang tinggi bagi barang-barang jadi mereka. Dalam perkembangan selanjutnya, terms of trade itu semakin menguntungkan mereka karena harga-harga barang jadi meningkat dengan meningkatnya kemakmuran, sedangkan harga komoditi primer tetap rendah.²

Selain itu mereka menguasai baik perdagangan internasional maupun pengangkutan barang-barang ekspor dan impor, dan secara demikian selain menerima komisi perdagangan, mereka juga dapat menentukan tarif pengangkutan yang tinggi.³ Sebagai akibatnya pendapatan ekspor negeri-negeri jajahan ditekan lagi, sedangkan harga barang-barang impor mereka menjadi lebih mahal. Walaupun tidak puas dengan keadaan itu, negeri-negeri jajahan tidak dapat berbuat banyak selain menerima terms of trade dan tarif-tarif yang tidak menguntungkan mereka. Mereka tidak mempunyai kedudukan tawar-menawar yang kuat.

Dengan demikian negara-negara penjajah menjadi semakin kaya dan makmur. Mereka dapat membeli bahan-bahan mentah dengan harga yang murah dan menjual barang-barang jadi mereka dengan harga yang tinggi. Selain itu mereka menikmati komisi perdagangan dan monopoli pengangkutan. Harga yang dibayarkan kepada negeri-negeri jajahan penghasil bahan mentah dan minyak adalah di bawah harganya di pasaran dunia di mana diperhitungkan pula keuntungan penjualan dan biaya pengangkutan. Negara-negara penjajah itu juga bisa memungut bea masuk dan pajak yang tinggi. Misalnya pendapatan Perancis dari pajak atas minyak per barrel yang diimpornya adalah lebih tinggi daripada pendapatan penghasilnya di Timur Tengah, dan secara demikian dapat membiayai pembangunan jaringan jalan raya yang

¹Lihat Mahbub ul-Haq, *The Poverty Curtain* (New York, 1976), hal. 162-164; dan D.K. Fieldhouse, "Colonialism II Economic Aspects," David B. Sills, ed., *International Encyclopaedia of the Social Sciences* (New York, 1972), jilid 3, hal. 6-12.

²Lihat "The Third World: What Does It Want?" *Time*, 8 September 1975; dan Mahbub ul-Haq, *op. cit.*, hal. 160.

hebat. Hal ini kurang lebih juga berlaku untuk lain-lain negara maju yang banyak mengimpor minyak.

Sebaliknya *negeri-negeri jajahan tetap miskin dan terbelakang*. Daya beli mereka bahkan semakin menurun karena terms of trade semakin merugikan mereka dalam arti bahwa harga bahan mentah dan lain komoditi primer mereka tetap rendah atau bahkan menurun, sedangkan harga barang-barang industri yang mereka impor semakin naik dengan meningkatnya upah-upah dan kesejahteraan sosial di negara-negara maju. Secara konkrit, dengan kuantitas komoditi primer mereka yang sama mereka bisa membeli semakin sedikit barang jadi atau untuk membeli kuantitas barang jadi yang sama mereka harus menjual semakin banyak komoditi primer.¹

Sesudah Perang Dunia II dunia mengalami suatu perubahan mendalam yang lambat-laun akan mengubah perimbangan kekuatan global. Di bawah tekanan nasionalisme yang melanda negeri-negeri jajahan seperti taufan dan pendapat umum dunia yang mengutuk kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya serta menuntut penghapusannya, negara-negara imperialis Barat memberikan kemerdekaan kepada negeri-negeri jajahan mereka dalam suatu proses dekolonisasi yang cepat. Portugal adalah satu-satunya negara penjajah yang lama menentang arus itu, tetapi menyusul kudeta militer di Lisabon tahun 1974 akhirnya mengalah juga.²

Akan tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa kolonialisme telah menjadi sejarah. Yang berakhir barulah penjajahan politik, sedangkan lain-lain jenis penjajahan masih bertahan. Jenis-jenis ini pada umumnya lebih halus dan terselubung, tetapi tidak kalah jeleknya karena juga berarti dominasi dan peme-rasan asing. Yang paling menonjol adalah *penjajahan ekonomi*. Negara-negara industri Barat tetap menguasai perekonomian negara-negara bekas jajahan, khususnya lewat sistem hubungan ekonomi internasional ciptaan jaman kolonial tersebut. Hampir semua negara bekas koloni itu bergantung pada negara-negara bekas penjajah mereka dan negara-negara industri lain untuk ekspor komoditi mereka maupun untuk impor barang jadi, modal, teknologi dan keahlian manajemen. Keadaan ketergantungan itu sebagian besar adalah akibat perkembangan mereka di masa lampau sebagai jajahan, yang terutama dimaksud untuk menunjang kepentingan-kepentingan ekonomi negara-negara penjajah, sehingga perekonomian mereka macet atau bahkan mundur dengan

¹Lihat "The World Against Itself," *Newsweek*, 8 September 1975.

²Mengenai proses dekolonisasi lebih lanjut lihat Rupert Emerson, *From Empire to Nation: The Rise and Self-Assertion of Asian and African Peoples* (Cambridge, Mass., 1960); Stewart C. Easton, *The Rise and Fall of Western Colonialism* (New York-London, 1964), hal. 3-13; dan Peter

segala akibat negatifnya. Seperti kita lihat di atas, terms of trade semakin merugikan mereka sehingga daya beli mereka semakin menurun.¹

Dengan demikian pada waktu mendapatkan kemerdekaan politik, negeri-negeri itu miskin dan lemah perekonomiannya serta bergantung pada negara bekas penjajah mereka. Mereka tidak mempunyai modal, tenaga ahli, teknologi dan lain sebagainya yang diperlukan untuk melancarkan pembangunan yang menyeluruh guna memperbaiki nasib rakyat. Untuk semuanya itu mereka bergantung sama sekali pada negara-negara industri bekas penjajah mereka. Oleh sebab persediaan terbatas, sedangkan peminatnya banyak, kedudukan tawar-menawar mereka lemah, sehingga mereka terpaksa menerima syarat-syarat yang lebih menguntungkan negara-negara maju tersebut.²

Dengan dalih untuk membantu negara-negara berkembang, negara-negara maju memberikan *pinjaman* dan *bantuan* cuma-cuma serta menanamkan modalnya di negara-negara berkembang itu, khususnya negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi jumlah pinjaman itu *tidak pernah mencukupi* dan diberikan *dengan banyak ikatan*. Antara lain pinjaman itu harus dibelanjakan di negara-negara pemberi, digunakan untuk proyek-proyek pembangunan yang mendapatkan persetujuan mereka, negara penerima harus menganut ekonomi liberal dan terbuka untuk investasi asing, lagi pula menerima penasihat-penasihat asing. Dikatakan bahwa pinjaman-pinjaman itu diberikan dengan syarat-syarat lunak, tetapi kenyataannya menjadi berat pula karena mengikat sehingga kurang menguntungkan negara penerima, khususnya karena sebagian besar harus digunakan dalam proyek-proyek yang menunjang kepentingan-kepentingan modal asing.³

Seperti dikemukakan di atas, salah satu syarat pemberian pinjaman ialah bahwa negara penerima menganut ekonomi liberal dan terbuka bagi investasi asing. Dalam kenyataan banyak pinjaman diberikan untuk memungkinkan atau mempermudah pengerukan kekayaan alamnya lewat pembangunan prasarana. Sebagian besar modal asing ditanamkan dalam industri ekstraktif seperti pertambangan, perminyakan, perkayuan dan pertanian komersial, yang menghasilkan komoditi untuk pasaran dunia. Sebagian juga ditanam

¹Lihat Kwame Nkrumah, *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism* (London, 1965); dan D.K. Fieldhouse, "Colonialism: Economic Aspects," dalam David L. Sills, ed., *International Encyclopaedia of the Social Sciences* (New York, 1972), jilid 3, hal. 6-12.

²Lihat Harry Magdoff, *The Age of Imperialism* (New York-London, 1969).

³Lihat Teresa Hayter, *Aid as Imperialism* (Penguin Books, 1974). Penulis membeberkan praktik-praktik bantuan luar negeri khususnya di Amerika Latin dan mengutip Presiden Kennedy sebagai mengatakan bahwa "bantuan asing adalah cara Amerika Serikat mempertahankan suatu

dalam industri manufacturing, khususnya untuk membuat atau merakit barang-barang mewah untuk konsumsi golongan elit pribumi maupun asing atau sebagai pengganti impor seperti obat-obatan, ban, bahan bangunan, perakitan kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

Industri pertambangan maupun manufacturing itu umumnya menggunakan *teknologi tinggi dan padat modal* sehingga hanya sedikit menyerap tenaga kerja setempat yang melimpah,¹ menuntut kebebasan sebesar mungkin mengenai produksi, pengangkutan, pemasaran, penentuan upah dan harga. Sesuai dengan itu pimpinan adalah di tangan tenaga asing sedangkan tenaga setempat hanya digunakan untuk fungsi-fungsi yang rendah dan dengan upah yang rendah pula. Secara demikian juga tidak terjadi alih teknologi yang merupakan suatu keharusan untuk pembangunan ekonomi menuju bagian yang lebih besar dari kekayaan alam negara berkembang masing-masing dan kemerdekaan ekonominya. Selanjutnya pabrik-pabrik yang didirikan itu menjadi *kantong-kantong asing* dalam masyarakat dan tiada integrasi dengan masyarakat setempat serta kehidupan nasional. Kantong-kantong itu umumnya lebih berorientasi pada luar negeri dan lebih merupakan lanjutan perekonomian negeri-negeri induk (asal modal) daripada negeri berkembang yang bersangkutan. Selain itu industri manufacturing terlalu terpusat di kota-kota besar yang telah memiliki prasarana serta fasilitas-fasilitas dengan maksud untuk menekan biaya produksi dan mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Para investor enggan untuk menyebar industri ke daerah-daerah karena lebih mahal dan lebih berat, sedangkan mereka tidak mempunyai komitmen pada pembangunan negeri. Maksud mereka pertama-tama adalah mencari untung sebesar mungkin dalam waktu yang sesingkat mungkin, tidak membantu negara berkembang yang bersangkutan. Hanya kalau diharuskan mereka akan memperhatikan tuntutan-tuntutan pembangunan nasionalnya.²

Sebagai akibatnya investor-investor asing itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa, jauh lebih besar dari keuntungan investasi mereka di negara mereka sendiri atau di negara maju lain, biarpun terdapat banyak pungutan liar yang merupakan beban bagi perusahaan mereka. Adanya pungutan-pungutan liar itu justru menunjukkan bahwa mereka mendapat keuntungan luar biasa. Biaya-biaya tambahan itu dimasukkan dalam harga-harga mereka. Secara demikian mereka mendapat banyak untung dengan menguras sumber-sumber daya alam negara berkembang yang bersangkutan, memeras tenaga

¹Lihat Keith Buchanan, "South-East Asia," *The Far East and Australasia 1974* (London: Europe Publications, 1974), hal. 394-395.

lokal sejauh digunakan, dan memeras rakyat banyak yang harus membayar harga yang lebih tinggi.¹

Dalam keadaan serupa itu maka alih sumber-sumber daya dari negara-negara industri ke negara-negara berkembang tidak memberikan hasil yang diharapkan oleh Dunia Ketiga. Jurang antara negara kaya dan negara miskin bahkan semakin meningkat. Dewasa ini sekitar 70-80% penduduk dunia yang hidup di Dunia Ketiga hanya memiliki 20-30% kekayaan dan pendapatan dunia. Perbandingan taraf hidup antara negara maju dan negara berkembang adalah 35 lawan 1 dan bisa menjadi 45 lawan 1 pada dasawarsa 1980-an ini kalau tidak terjadi perubahan fundamental dalam sistem ekonomi dunia.²

Akhirnya juga perlu disebutkan dominasi negara-negara industri dalam lembaga-lembaga khusus PBB seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD), Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) dan lain sebagainya. Perwakilan negara-negara berkembang di lembaga-lembaga itu terlalu kecil sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambilnya lebih menguntungkan negara-negara industri. Kebanyakan kedudukan senior pada stafnya juga ditempati oleh ahli-ahli negara-negara industri. Dengan demikian lembaga-lembaga itu kurang mencerminkan sifat mereka sebagai lembaga dunia dan lebih merupakan alat negara-negara industri untuk menguasai dan mengatur perekonomian dunia.³

Itulah secara singkat pokok-pokok sistem ekonomi internasional yang berlaku selama ini. Sistem serupa itu tidak dapat disebut tata. Seperti ditan-daskan dalam Laporan Club of Rome, *Reshaping the International Order* (RIO), ia lebih merupakan suatu *disorder* atau *kekacauan* dan harus dirombak dan diganti dengan suatu sistem yang benar-benar tata atau orde.⁴ Hal itu ditegaskan oleh Kurt Waldheim selaku Sekjen PBB sebagai berikut:

"Negara-negara baru, setelah mendapatkan kemerdekaan politik, menemukan bahwa dirinya terikat oleh ketergantungan ekonomi. Lama orang berpikir bahwa penyelesaian masalah ini adalah bantuan dan pertolongan. Akan tetapi menjadi semakin jelas, bahwa diperlukan suatu tata ekonomi internasional baru untuk mengubah hubungan-hubungan antara bangsa-

¹Lihat Mahbub ul-Haq, *op. cit.*, hal. 161; lebih lanjut lihat Richard J. Bennet dan Ronald E. Muller, *Global Reach: The Power of the Multinational Corporations* (New York, 1974).

²Lihat CSIS, "Dialog Utara-Selatan: Segi Politik dan Ekonomi Tata Ekonomi Internasional Baru," *Analisa*, Juni 1979, hal. 482.

³Lihat Mahbub ul-Haq, *op. cit.*, hal. 161-162; dan "The World Against Itself," *Newsweek*,

bangsa kaya dan miskin menjadi suatu partnership yang saling menguntungkan. Kalau tidak, maka jurang antara kelompok-kelompok bangsa sekarang ini akan semakin merupakan ancaman potensial bagi perdamaian dan keamanan internasional."¹

TATA EKONOMI DUNIA BARU

Asas pokok yang mendasari tata ekonomi dunia baru yang diperjuangkan Dunia Ketiga sebagai ganti sistem yang berlaku selama ini ialah bahwa semua negara harus memiliki kemerdekaan ekonomi di samping kemerdekaan politik, tetapi karena saling memerlukan dan dapat saling melengkapi harus bekerja sama atas dasar persamaan hak serta manfaat bersama, dan bahwa kekayaan dunia dimaksud untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk negara-negara yang kuat kedudukannya, dan oleh sebab itu harus dibagi demikian rupa sehingga setiap bangsa mendapatkan bagian yang wajar. Ia harus dibangun atas *apa yang benar* (what is right). Sistem ekonomi internasional yang berlaku selama ini didasarkan atas kekuatan politik dan ekonomi, dan oleh sebab itu harus dirombak dan diganti dengan suatu tata baru yang dibangun atas dasar moral itu.²

Karena berkisar pada manusia sebagai subyek dan tujuannya, segala bidang kehidupan bersama dan hubungan antar negara maupun lembaga-lembaga dan pranata-pranata internasional tidak boleh lepas dari moral tetapi harus didasari dan dijiwai olehnya. Semuanya itu harus memungkinkan setiap orang hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mencapai kesejahteraan lahir batinnya.³ Secara konkrit itu berarti bahwa liberalisme yang sering terungkap dalam berlakunya hukum rimba dalam hubungan-hubungan internasional harus diganti dengan norma-norma moral yang khususnya dijabarkan dari hakikat (nature) manusia sebagai makhluk individual dan sosial, dan oleh sebab itu bersifat universal. Hubungan-hubungan itu terutama harus didasari dan dijiwai oleh *keadilan* baik keadilan tukar-menukar atau komutatif maupun keadilan sosial. Yang pertama mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antar badan hukum termasuk negara, yang kedua hubungan antara masyarakat termasuk masyarakat dunia dan para anggotanya. Keadilan sosial berlaku baik untuk masyarakat nasional maupun internasional. Dalam masyarakat internasional ia mewajibkan bangsa-bangsa anggotanya untuk memberikan sumbangan mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing demi terwujudnya kesejahteraan seluruh umat manusia, dan sebaliknya mewajibkan masyarakat internasional untuk membagi keka-

¹Ibid., hal. 9.

²Ibid., hal. 61-64.

yaan dunia maupun beban demi kesejahteraan universal itu kepada semua bangsa anggotanya. Dalam hubungan ini gagasan *pajak dunia* yang diajukan Menteri Widjojo Nitisastro pada UNCTAD V di Manila tahun 1979 adalah sangat tepat dan perlu didukung sepenuhnya.¹

Seperti diakui secara umum dan juga ditandaskan dalam Pembukaan UUD 1945, setiap negara berhak atas kemerdekaan baik politik maupun ekonomi, sosial dan budaya, dan untuk mewujudkannya harus mengurangi ketergantungannya pada negara-negara lain sejauh mungkin. Dalam bidang ekonomi hal itu berarti bahwa ia berhak dan wajib melakukan *diversifikasi ekonomi serta industrialisasi* dan mendapatkan terms of trade yang wajar. Sehubungan dengan itu sistem pembagian kerja internasional yang berlaku selama ini, yang menempatkan negara-negara berkembang sebagai penghasil dan pengekspor bahan mentah dan komoditi primer lain, harus diubah. Secara berangsur-angsur negara-negara itu harus melakukan diversifikasi ekonomi termasuk industrialisasi. Ini merupakan salah satu tuntutan pokok Kelompok 77.²

Mengenai *kekayaan alam* mereka, negara-negara berkembang menuntut *kedaulatan penuh* dan dalam rangka itu menuntut hak untuk mengawasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di bidang itu, menuntut pribumisasi modal dan personal secara progresif, termasuk pimpinannya, ikut menentukan kebijaksanaan produksi, distribusi dan pemasaran. Mereka juga menuntut agar dimungkinkan mengolah sendiri bahan mentah mereka menjadi barang jadi atau setengah jadi untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari kekayaan alam mereka. Secara demikian mereka akan mampu memperluas kesempatan kerja dan memberantas atau mengurangi pengangguran massal yang mengganggu hampir semua negara berkembang.³

Dalam *bidang perdagangan* negara-negara berkembang menuntut *terms of trade yang lebih baik*. Hal ini berarti keseimbangan antara harga impor dan ekspor yang ditetapkan bersama oleh negara-negara pengimpor dan pengekspor. Dalam rangka itu negara-negara berkembang memperjuangkan harga-harga yang lebih baik dan mantap bagi komoditi mereka. Dengan maksud itu mereka menuntut apa yang disebut *indeksasi*, yaitu pengaitan harga barang impor dan harga barang ekspor mereka.⁴ Tidak boleh terjadi bahwa harga

¹Lihat Mahbub ul-Haq, *op. cit.*

²Lihat Mahbub ul-Haq, *op. cit.*, hal. 197-198; dan Jan Tinbergen, *op. cit.*, hal. 141-144.

³Lihat Mahbub ul-Haq, *op. cit.*, hal. 197-198; Jan Tinbergen, *op. cit.*, hal. 146-151; dan "The Third World: What Does It Want?" *Time*, 8 September 1975.

komoditi ekspor mereka tetap atau bahkan menurun, sedangkan harga barang-barang impor mereka dari negara-negara industri terus meningkat dengan meningkatnya upah-upah dan kesejahteraan sosial seperti terjadi selama ini.

Dunia Ketiga juga memperjuangkan agar *lembaga-lembaga moneter dan keuangan dunia* seperti IMF dan Bank Dunia benar-benar *bersifat dunia* dan oleh sebab itu agar partisipasi negara-negara berkembang ditambah, baik dalam pimpinan yang mengambil keputusan-keputusan maupun dalam stafnya yang melaksanakan keputusan-keputusan itu. Lewat partisipasi yang lebih besar itu mereka bisa menjamin bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga itu diambil demi kepentingan bersama negara industri dan negara berkembang.¹

Karena saling bergantung dan saling membutuhkan, negara-negara maju dan berkembang harus *bekerja sama* akan tetapi kerja sama antar negara itu harus dilakukan atas *dasar persamaan dan manfaat bersama*, bukan seperti antara majikan dan karyawannya tetapi sebagai rekan yang sederajat. Dalam rangka itu syarat-syarat bantuan luar negeri harus diperlunak, dan investasi asing harus lebih diawasi agar tidak merugikan negara-negara berkembang yang bersangkutan, tetapi menunjang strategi pembangunan nasional mereka.² Sehubungan dengan itu negara-negara berkembang itu sendiri harus meningkatkan mutu termasuk kejujuran pejabat-pejabat mereka dan menutup peluang-peluang untuk pungutan liar, manipulasi dan negosiasi pajak yang menguntungkan wajib pajak dan petugas pajak tetapi merugikan negara dan rakyat banyak.

Negara-negara berkembang juga menuntut ganti rugi atau *kompensasi* bagi eksploitasi dan pengurusan serta kerugian terhadap kekayaan alam dan kekayaan-kekayaan lain mereka yang terjadi di masa lampau, baik di jaman penjajahan maupun sesudahnya.³

Yang diperjuangkan Dunia Ketiga bukanlah belas kasihan atau kemurahan hati negara-negara industri yang kaya, melainkan *keadilan* dalam bentuk harga-harga yang wajar dan seimbang, kemampuan mengolah bahan mentah mereka (industrialisasi) untuk mendapatkan nilai tambah, dan kompensasi bagi pemerasan di masa lampau.⁴ Dengan pertimbangan bahwa negara-

¹Lihat Jan Tinbergen, *op. cit.*, hal. 126-128; dan "The World Against Itself," *Newsweek*, 8 September 1975.

²Lihat Mahbub ul-Haq, *op. cit.*, hal. 177-181; dan karangan "Faisal and Oil: Driving toward a New World Order," *Time*, 6 Januari 1975.

³Lihat karangan "The World Against Itself," *Newsweek*, 8 September 1975; dan Mahbub ul-

negara maju telah berhasil mempercepat pembangunan nasional mereka dan mencapai tingkat kemakmuran mereka sekarang ini antara lain dengan menguras sumber-sumber daya alam negara-negara berkembang dengan harga yang kelewat murah, minta harga yang semakin meningkat untuk barang-barang jadi yang mereka ekspor, dan menuntut biaya pengangkutan yang terlalu tinggi, Dunia Ketiga menuntut kepada negara-negara maju agar membayar ganti rugi dalam bentuk bantuan cuma-cuma (grants), pinjaman dalam jumlah yang memadai dan tanpa syarat-syarat yang terlalu mengikat, dan alih teknologi dengan syarat-syarat yang lunak.¹

PERJUANGAN JANGKA PANJANG

Berkat perjuangan negara-negara berkembang yang pada akhir Sidang UNCTAD I di Jenewa tahun 1964 membentuk Kelompok 77 untuk memperkuat kedudukan tawar-menawar mereka dengan negara-negara industri yang kaya, pada tahun 1974 Majelis Umum PBB mengadakan suatu sidang khusus dan menerima suatu *Deklarasi Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru* dan suatu *Program Aksi* yang memuat serangkaian tindakan yang perlu diambil oleh masyarakat internasional untuk mewujudkan tata itu. Dalam Deklarasi itu Majelis Umum PBB menyatakan tekad bersamanya untuk memperjuangkan "pembentukan suatu tata ekonomi internasional baru berdasarkan keadilan, persamaan kedaulatan, interdependensi, kepentingan bersama dan kerja sama semua bangsa, tanpa pandang sistem-sistem ekonomi dan sosial mereka, yang akan memperbaiki perbedaan-perbedaan dan membetulkan ketidakadilan-ketidakadilan yang ada, memungkinkan menghapus jurang yang melebar antara negara-negara maju dan berkembang serta menjamin agar secara mantap dipercepat pembangunan ekonomi dan sosial serta perdamaian dan keadilan untuk generasi-generasi sekarang dan mendatang."

Salah satu dari 20 asas yang disebutkan dalam Deklarasi itu menyatakan "kedaulatan abadi setiap negara atas kekayaan alamnya" dan menegaskan bahwa setiap negara berhak untuk menguasai kekayaan alamnya dan eksploatasinya, lagi pula menasionalisasinya. Menurut suatu asas lain, semua negeri di bawah pendudukan asing, kekuatan kolonial dan apartheid mempunyai "hak atas ganti rugi dan kompensasi penuh bagi eksploitasi, dan pengurusan serta pengrusakan terhadap kekayaan alam dan kekayaan lain" mereka. Mengenai perdagangan diserukan "suatu perbandingan adil dan wajar antara harga-harga bahan-bahan mentah, hasil-hasil primer, barang-barang jadi dan setengah jadi yang diekspor negara-negara berkembang

¹Lihat *Deklarasi Pembentukan Suatu Tata Ekonomi Internasional Baru*, Resolusi Sidang

dan harga-harga bahan-bahan mentah, komoditi-komoditi primer, barang-barang jadi, barang-barang modal dan perlengkapan yang diimpor oleh mereka dengan maksud untuk mencapai perbaikan dalam terms of trade mereka yang tidak memuaskan dan dalam perluasan perekonomian dunia."

Dalam rangka industrialisasi negara-negara berkembang hendaknya diberi akses ke "penemuan-penemuan ilmu dan teknologi modern" dan digalakkan "alih teknologi dan penciptaan teknologi pribumi demi kepentingan negara-negara berkembang dalam bentuk-bentuk dan sesuai dengan prosedur yang cocok untuk perekonomian mereka."¹

Bagaimana asas-asas itu harus diterapkan dijelaskan secara terperinci dalam *Program Aksi*. Salah satu ketentuannya menyerukan agar diambil langkah-langkah untuk mempermudah berfungsinya organisasi-organisasi produsen, termasuk pemasaran bersama, perdagangan teratur, perbaikan penerimaan ekspor negara-negara berkembang produsen serta dalam terms of trade, dan pertumbuhan ekonomi dunia. Suatu seksi yang berkaitan menandakan bahwa "pengerahan sumber-sumber daya alam secara yang semakin efektif oleh kelompok negara pengekspor minyak demi pembangunan ekonomi harus disambut dengan baik. Selain itu *Program Aksi* menyerukan penurunan tarif pengangkutan dan biaya asuransi bagi negara-negara berkembang, lagi pula menandakan bahwa mereka harus dimungkinkan mendapatkan teknologi dengan syarat-syarat yang lebih baik."²

Langkah berikutnya yang penting ialah diadakannya Sidang Khusus Majelis Umum PBB pada 1-2 September 1975 untuk membicarakan pelaksanaan tata ekonomi internasional baru itu. Sebagai hasilnya disahkan suatu rencana menyeluruh untuk membantu negara-negara berkembang dalam krisis ekonomi dunia. Rencana itu menggariskan langkah-langkah yang harus diambil untuk memberi mereka suatu bagian yang lebih baik dan lebih menguntungkan bagi usaha mereka untuk meningkatkan produksi industri dan pertanian. Mengenai perdagangan internasional ditetapkan bahwa "harus dilakukan gabungan usaha-usaha internasional dan nasional menuju perluasan dan diversifikasi perdagangan negara-negara berkembang, perbaikan lewat diversifikasi kapasitas produktif mereka, perbaikan produktivitas mereka dan peningkatan penerimaan ekspor." Mengenai bantuan pembangunan, negara-negara industri hendaknya berusaha sebaik mungkin untuk memindahkan 0,7% GNP mereka ke negara-negara berkembang. IMF hendaknya menciptakan tambahan SDR untuk pembangunan dan dengan maksud itu membentuk dana trust baru, yang sebagian akan dibiayai dengan penjualan emasnya dan sebagian dengan iuran-iuran. Langkah-langkah lain untuk memberikan bantuan keuangan harus dibiayai lewat Bank Dunia dan IMF. Mengenai alih

teknologi ditetapkan: "Semua negara harus bekerja sama dalam mengembangkan suatu kode tingkah laku alih teknologi. Negara-negara maju harus membuka pintu mereka selebar-lebarnya bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan teknologi yang pengalihannya tidak tunduk pada keputusan-keputusan swasta." Dalam bidang industrialisasi UNIDO hendaknya menggalakkan bantuan dalam proses industrialisasi negara-negara berkembang menurut Rencana Aksi Lima.¹

Kelihatannya semuanya itu merupakan suatu hasil yang gemilang, tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Sejauh ini ketentuan-ketentuan itu *tidak dilaksanakan*, khususnya karena ditentang oleh Amerika Serikat, Jerman Barat dan Jepang. Ketiga negara ini berpendapat bahwa tidak diperlukan tata ekonomi internasional baru karena sistem yang berlaku selama ini pada dasarnya baik dan hanya perlu perbaikan di sana-sini. Dengan tegas mereka menolak tuntutan Dunia Ketiga agar kekayaan dunia dibagi kembali. Pada Sidang UNCTAD IV di Nairobi, 5-31 Mei 1976, yang diadakan untuk membicarakan pelaksanaan resolusi Sidang Khusus Majelis Umum PBB tahun 1975 itu terjadi perdebatan sengit. Negara-negara industri tetap pada pendirian mereka dan hanya bersedia memberikan konsesi-konsesi kecil. Dengan demikian sidang itu dapat dikatakan gagal.² Demikian pun Konperensi Kerja Sama Ekonomi Internasional (CIEC) di Paris pada 1975-1977, UNCTAD V di Manila tahun 1979, UNCTAD VI di Beograd tahun 1983, Sidang Khusus Majelis Umum PBB ke-11 tahun 1980 dan Pertemuan Puncak 22 negara industri dan berkembang di Cancun tahun 1981.³

Sikap keras negara-negara industri itu disayangkan oleh Dunia Ketiga tetapi bisa dimengerti. Terwujudnya tata baru itu akan berarti bahwa negara-negara maju akan kehilangan kedudukan dominan mereka dalam perekonomian dunia. Seperti ditegaskan oleh Gunnar Myrdal, tata ekonomi dunia baru hanya dapat diwujudkan kalau bangsa-bangsa maju bersedia mengurangi konsumsi mereka.⁴ Oleh sebab itu perjuangan tata ekonomi dunia baru itu akan berat dan lama.

TAHAP KEDUA DEKOLONISASI

Dengan demikian bagi negara-negara berkembang tiada jalan lain kecuali merapatkan barisan mereka dan menghimpun kekuatan mereka menjadi satu

¹Lihat *The New Standard*, 20 September 1975 dan *Antara*, 17 September 1975.

²Lihat Laporan *Sinar Harapan*, 13 Mei 1976 dan *Kompas*, 26 Mei 1976.

³Lihat editorial "Enough is Enough," *The South*, Desember 1981; lihat juga Mary Anne Thomson dan Francis Khor, "Sino-US Relations and the Third World," *The South*, Desember 1981.

kekuatan tandingan yang ampuh. Seperti ditegaskan oleh Mahbub ul-Haq, "... kekuatan yang ada tidak pernah diubah sepanjang sejarah kecuali lewat organisasi suatu kekuatan tandingan." Dalam rangka itu mereka harus mengembangkan percaya-diri individual dan kolektif mereka dan menuangkannya dalam program-program aksi yang positif dan konkrit. Mereka mempunyai sumber-sumber daya dan ketrampilan untuk mengembangkan lembaga-lembaga keuangan dan moneter mereka sendiri. Mereka dapat membangkitkan volume perdagangan yang jauh lebih besar di antara mereka sendiri. Mereka dapat mendirikan bank, lembaga keuangan, pengaturan tarif dan perdagangan dan satuan rekening (account) mereka sendiri. Kalau tidak dikembangkan lembaga-lembaga moneter, keuangan dan investasinya sendiri, Dunia Ketiga tidak akan mempunyai kedudukan ekonomi dan politik untuk memaksa Utara mengubah sistemnya demi kepentingan bersama. Sehubungan dengan itu Selatan memerlukan suatu komisi independen yang permanen, terdiri atas negarawan, profesional dan akademisi, untuk meninjau kembali situasi sekarang ini secara mendalam dan menyarankan tindakan-tindakan konkrit guna mengembangkan lembaga-lembaga semacam itu. Dibentuknya komisi semacam itu yang didukung sepenuhnya oleh Kelompok 77, Gerakan Non-Blok, dan OPEC akan menunjukkan tekad Selatan dan kiranya bisa memaksa Utara mengadakan perundingan-perundingan global di PBB. Semuanya itu mengandaikan bahwa negara-negara Selatan bersedia mengumpulkan sumber daya dan ketrampilan mereka untuk mengembangkan lembaga-lembaga kolektif yang mengandalkan dirinya sendiri.¹

Dalam pada itu negara-negara berkembang harus yakin bahwa perjuangan mereka, biarpun berat dan lama, akhirnya akan berhasil juga karena terwujudnya tata ekonomi dunia baru itu merupakan *tahap kedua proses dekolonisasi* dan secara demikian suatu *proses sejarah* yang bisa dihambat tetapi tidak bisa dibendung untuk selama-lamanya.

Proses itu kiranya dapat dipermudah dan dipercepat dengan pelaksanaan keadilan sosial di negara-negara berkembang itu sendiri secara sungguh-sungguh. Salah satu sebab utama mengapa bangsa-bangsa maju enggan untuk meningkatkan bantuan mereka untuk Dunia Ketiga ialah kenyataan bahwa sebagian bantuan luar negeri dan hasil pembangunan yang dicapai selama ini di banyak negara Dunia Ketiga masuk kantong sedikit orang kaya, sedangkan rakyat banyak tetap miskin. Dengan latar belakang ini tuntutan pemimpin-pemimpin Dunia Ketiga akan pemerataan internasional dan pembagian kembali kekayaan dunia sangat kurang meyakinkan pemimpin-pemimpin Dunia Pertama atau Utara. Oleh sebab itu, dalam rangka perjuangan tata ekonomi dunia baru negara-negara berkembang harus meningkatkan usaha mereka

untuk meratakan pendapatan nasional dan memberantas kepincangan-kepincangan sosial, termasuk pola hidup mewah golongan elit kecil di tengah-tengah kemiskinan rakyat banyak. Perjuangan itu tidak hanya menuntut agar negara-negara berkembang mendapatkan bagian yang lebih wajar dari kekayaan dan pendapatan dunia, tetapi juga agar di negara berkembang masing-masing rakyat banyak mendapat perhatian yang lebih besar dan diikutsertakan dalam kehidupan ekonomi maupun hasil-hasilnya.¹ Sehubungan dengan itu disambut dengan gembira bahwa sejak GBHN 1978 dan Pelita III, Indonesia memberikan prioritas kepada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

